

BAB I

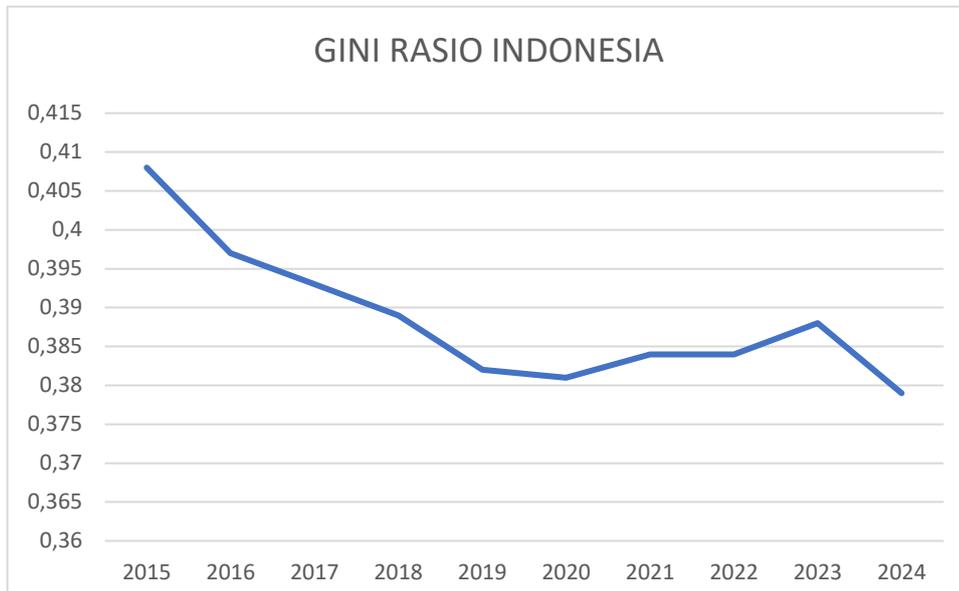
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki tantangan besar dalam memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Perekonomian Indonesia ditopang oleh berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur, jasa, hingga sektor pertanian.

Namun, di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif, ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah yang signifikan. Ketimpangan pendapatan ialah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Semakin besar jurang pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan (RISKY SABILLAH, 2023). Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat dan antarwilayah di Indonesia. Ketimpangan pendapatan menjadi persoalan ekonomi paling mendasar yang selalu menjadi pusat perhatian karena sulit terpecahkan hampir di setiap negara sedang berkembang, termasuk Indonesia (Pokhrel, 2024). Ketimpangan pendapatan memiliki konsep yang sangat luas dibandingkan dengan kemiskinan, didefinisikan bahwa ketimpangan ialah seluruh populasi yang ada (Katon Prasetyo Wibowo & Pangestuty, 2023). Ketimpangan distribusi pendapatan diukur menggunakan metode perhitungan indeks gini atau gini ratio, yang dimana indeks gini merupakan

ukuran yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan yang apabila semakin tinggi nilai koefisien gini semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pendapatan sebaliknya semakin rendah nilai koefisien gini maka akan semakin



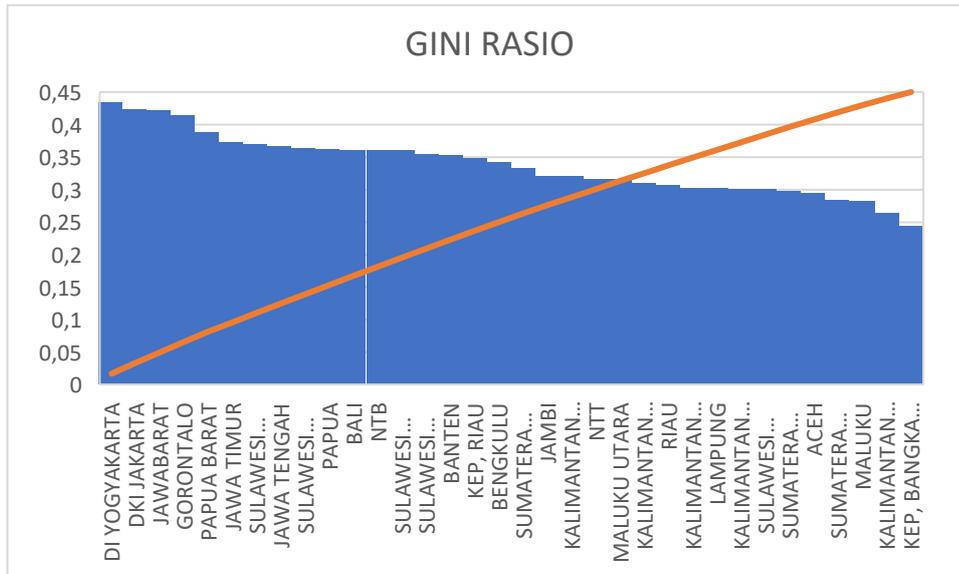
Gambar 1. 1 Gini Rasio Indonesia
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

merata pula tingkat distribusi pendapatannya.

Berdasarkan data yang disajikan, nilai Gini Rasio Indonesia mengalami tren penurunan dari tahun 2015 hingga 2020, menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kesenjangan ekonomi sedikit berkurang selama periode tersebut. Pada tahun 2015, nilai Gini Rasio Indonesia tercatat sebesar 0,408. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 0,397, kemudian kembali menurun pada tahun 2017 dengan nilai 0,393, dan pada tahun 2018 turun lagi menjadi 0,389. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2019 dan 2020, dengan nilai Gini Rasio masing-masing sebesar 0,389 dan 0,381. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, Gini Rasio mengalami peningkatan menjadi 0,384 dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 0,388. Pada tahun 2024, angka tersebut kembali menurun menjadi 0,379 yang dapat diartikan sebagai tanda

perbaikan dalam pemerataan pendapatan. Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, tren jangka panjang menunjukkan kecenderungan penurunan ketimpangan, meskipun ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan yang perlu terus diperhatikan.

Beberapa provinsi di Indonesia menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi dengan tingkat industrialisasi yang tinggi dan pusat ekonomi cenderung memiliki Gini Rasio yang lebih besar karena adanya kesenjangan pendapatan yang mencolok antara pekerja sektor formal dengan mereka yang bekerja di sektor informal atau memiliki keterampilan rendah. Sementara itu, di provinsi dengan ekonomi berbasis agraris atau sektor informal yang dominan, ketimpangan mungkin lebih rendah, tetapi pendapatan rata-rata masyarakat juga cenderung lebih kecil. Ketimpangan pendapatan antarprovinsi dapat berdampak pada rendahnya mobilitas sosial dan meningkatkan tingkat kemiskinan di daerah dengan perekonomian yang tertinggal. Selain itu, ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional karena ketidakmerataan distribusi sumber daya dan peluang ekonomi di berbagai wilayah. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti akses terhadap lapangan kerja yang berkualitas, tingkat pendidikan, serta kebijakan upah minimum yang diterapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

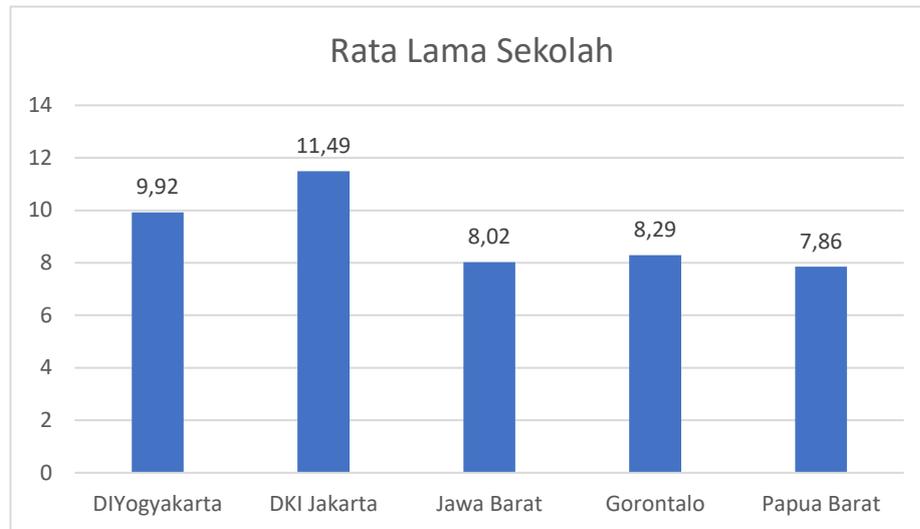


Gambar 1. 2 Gini Rasio Indonesia per Provinsi 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap lima provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia pada tahun 2024. Lima provinsi yang dijadikan sampel adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi dengan nilai 0,435 , Diposisi kedua yaitu provinsi DKI Jakarta dengan nilai gini rasio sebesar 0,423, Kemudian ketiga yaitu Jawa Barat dengan angka gini rasio sebesar 0,421, Keempat yaitu provinsi Gorontalo yang memiliki nilai gini rasio sebesar 0,414 , dan Papua Barat sebagai provinsi kelima dengan nilai gini rasio tinggi sebesar 0,389, kelima provinsi tersebut memiliki nilai Gini Rasio tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Setiap provinsi memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, seperti dominasi sektor jasa dan industri di DKI Jakarta dan Jawa Barat, sektor pendidikan dan pariwisata di DIY, serta sektor sumber daya alam di Gorontalo dan Papua Barat. Ketimpangan pendapatan dapat terjadi karena faktor-faktor seperti perbedaan akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, serta kebijakan ekonomi.

Tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat ketimpangan pendapatan. Tingkat pendidikan dapat diukur dengan rata-rata lama sekolah, rata rata lama sekolah merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat ketimpangan pendapatan. Salah satu komponen yang paling penting dari pembangunan manusia adalah pendidikan, yang dianggap sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Duarsa & Wijaya, 2023). Pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka peluang kerja dengan upah yang lebih baik. Provinsi yang memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih kompeten, sehingga mereka lebih mudah memperoleh pekerjaan dengan gaji yang layak. Sebaliknya, di daerah dengan tingkat pendidikan rendah, masyarakat akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga kesejahteraan mereka sulit meningkat. Oleh karena itu, investasi dalam sektor pendidikan menjadi strategi utama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain itu, pendidikan yang lebih baik juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak tenaga kerja serta memperluas akses ke pekerjaan di sektor formal yang lebih produktif.



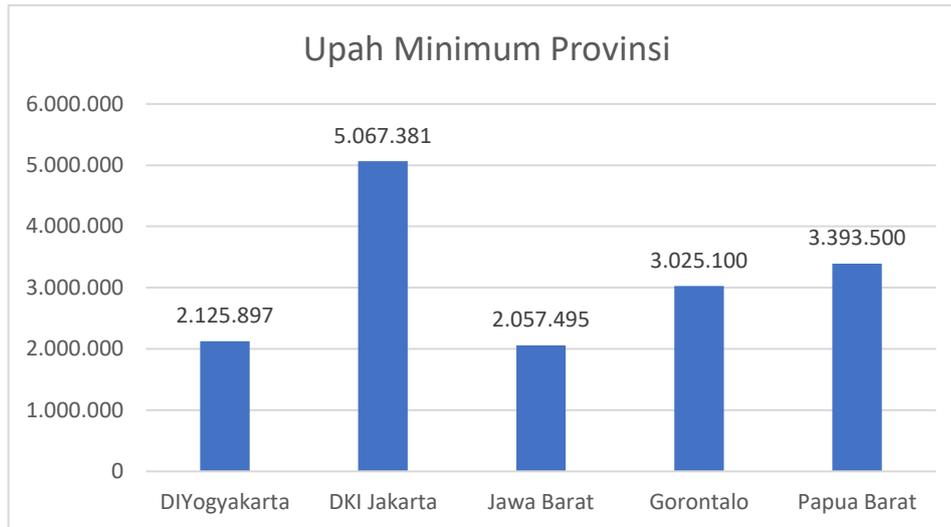
Gambar 1. 3 Rata-Rata Lama Sekolah per Provinsi
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dari data tersebut, Pada tahun 2024 DKI Jakarta memiliki persentase rata-rata lama sekolah tertinggi (11,49%), mencerminkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan dominasi sektor industri serta jasa yang membutuhkan tenaga kerja berpendidikan tinggi. DIY Yogyakarta, dengan angka 9,92%, menunjukkan partisipasi pendidikan yang cukup tinggi, namun tetap mengalami ketimpangan pendapatan yang signifikan, kemungkinan akibat ketidakseimbangan antara sektor pendidikan dan sektor informal yang berkembang di wilayah tersebut.

Di sisi lain, Jawa Barat (8,02%), Gorontalo (8,29%), dan Papua Barat (7,86%) memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam akses dan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah tersebut, yang dapat berkontribusi terhadap kesenjangan ekonomi. Rendahnya angka ini bisa mencerminkan tingginya jumlah penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan menengah atau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga berpengaruh terhadap daya saing tenaga kerja dan tingkat pendapatan.

Ketimpangan pendidikan ini dapat menjadi faktor utama dalam ketimpangan ekonomi, di mana wilayah dengan akses pendidikan lebih baik cenderung memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata.

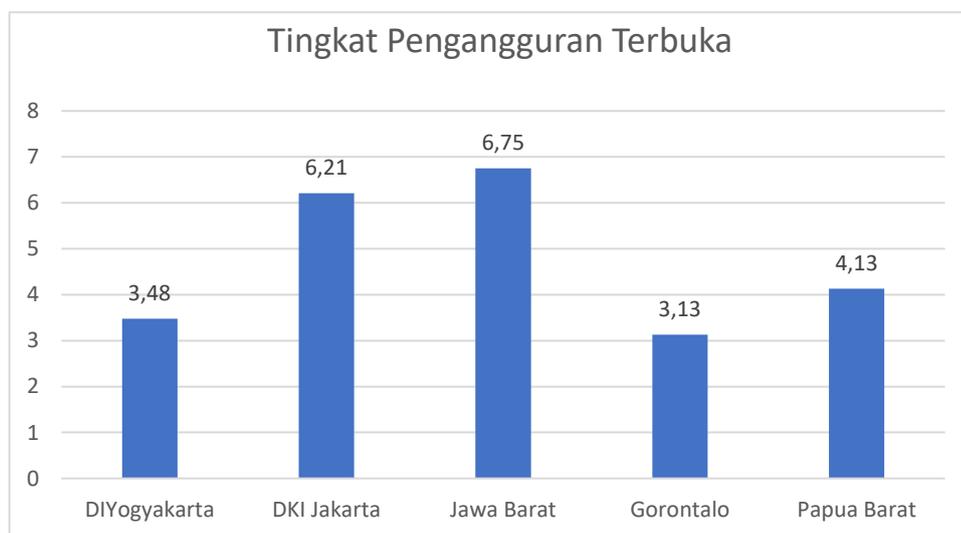
Selain pendidikan, kebijakan upah minimum provinsi (UMP) juga berpengaruh terhadap distribusi pendapatan. UMP ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja agar mereka mendapatkan upah yang layak. penetapan upah minimum diberlakukan demi meningkatkan pendapatan masyarakat miskin demi mempersempit ketimpangan pendapatan (Nurain & Juliannisa, 2022). Namun, perbedaan signifikan dalam besaran UMP antarprovinsi dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan. Di daerah dengan UMP yang tinggi, perusahaan cenderung mengurangi jumlah pekerja tetap dan lebih memilih tenaga kerja kontrak atau informal, yang pada akhirnya dapat memperburuk ketimpangan. Sementara itu, di daerah dengan UMP rendah, pekerja cenderung menerima penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga memperlebar kesenjangan antara kelompok pendapatan rendah dan tinggi.



Gambar 1. 4 Upah Minimum Provinsi per Provinsi
 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Data Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 menunjukkan adanya disparitas yang cukup signifikan antar wilayah, yang dapat menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan pendapatan. DKI Jakarta memiliki UMP tertinggi sebesar Rp5.067.381, mencerminkan tingginya biaya hidup serta dominasi sektor industri dan jasa dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Sementara itu, DIY Yogyakarta dan Jawa Barat memiliki UMP yang jauh lebih rendah, masing-masing Rp2.125.897 dan Rp2.057.495, meskipun merupakan daerah dengan jumlah tenaga kerja besar. Di sisi lain, Gorontalo dan Papua Barat memiliki UMP lebih tinggi dibandingkan DIY dan Jawa Barat, yakni Rp3.025.100 dan Rp3.393.500. Hal ini dapat dikaitkan dengan kebijakan upah yang mempertimbangkan tingkat kesejahteraan serta struktur ekonomi berbasis sumber daya alam. Perbedaan UMP ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di berbagai wilayah tidak merata, yang berpotensi memperbesar ketimpangan ekonomi. Kenaikan upah minimum di setiap provinsi dianggap sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan pendapatan (Julihanza & Khoirudin, 2023).

Tingkat pengangguran terbuka juga merupakan faktor yang memiliki hubungan erat dengan ketimpangan pendapatan. Pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa masih banyak individu yang belum mendapatkan kesempatan kerja yang layak, terutama di sektor formal. Hal ini sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri serta terbatasnya lapangan pekerjaan di beberapa daerah. Ketika tingkat pengangguran meningkat, distribusi pendapatan menjadi semakin timpang karena kelompok masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan semakin tertinggal dibandingkan dengan mereka yang memiliki pekerjaan tetap dengan pendapatan stabil. Selain itu, tingginya pengangguran juga dapat meningkatkan jumlah pekerja di sektor informal, yang umumnya memiliki perlindungan tenaga kerja serta penghasilan yang lebih rendah, sehingga semakin memperburuk ketimpangan pendapatan.



Gambar 1. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka per Provinsi
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar provinsi, yang berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan. Jawa Barat mencatat TPT tertinggi sebesar 6,75%, diikuti oleh DKI Jakarta sebesar 6,21%, yang mencerminkan persaingan ketat di pasar

tenaga kerja serta tingginya jumlah angkatan kerja yang belum terserap. Sementara itu, DIY Yogyakarta (3,48%), Gorontalo (3,13%), dan Papua Barat (4,13%) memiliki TPT lebih rendah, yang dapat disebabkan oleh dominasi sektor informal dan sektor berbasis sumber daya alam yang lebih fleksibel dalam menyerap tenaga kerja. Tingginya tingkat pengangguran di wilayah industri dan jasa dapat memperburuk ketimpangan pendapatan karena mencerminkan keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak. Apabila tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan dalam suatu wilayah, maka pendapatan per kapita yang diterima oleh sekelompok pihak menjadi semakin menurun. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat pengangguran menurun, maka akan terjadi peningkatan pendapatan per kapita, yang mana hal itu mungkin dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan disuatu wilayah itu juga (luluk miftahurrohmah, 2021).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan dengan berpedoman pada literatur serta beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana upah minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, dan rata-rata lama sekolah berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi tersebut. Penulis mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul: “DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI INDONESIA (STUDI KASUS DIY YOGYAKARTA, DKI JAKARTA, JAWA BARAT, GORONTALO, PAPUA BARAT)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas sehingga muncul rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini antara lain :

1. Apakah variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh pada ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia ?
2. Apakah variabel upah minimum provinsi berpengaruh pada ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia?
3. Apakah variabel tingkat pengangguran terbuka provinsi berpengaruh pada ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh rata rata lama sekolah terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat pegangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini mencakup data *time series* tahun 2015-2024 dan *cross section* pada 5 provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi yaitu DIY Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo dan Papua Barat.
2. Penelitian ini menggunakan ketimpangan pendapatan sebagai variabel dependen sedangkan rata – rata lama sekolah, upah minimum provinsi dan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel independen.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman dalam bidang ekonomi, khususnya terkait ketimpangan pendapatan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman dalam penyusunan karya ilmiah yang mendalam dan sistematis.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi pemerintah atau lembaga terkait dalam merumuskan serta mengevaluasi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar provinsi.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai ketimpangan pendapatan, rata-rata lama sekolah, upah minimum provinsi, dan tingkat pengangguran terbuka, terutama di lima provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia.